



# Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango

William Indra S. Mooduto<sup>a</sup>, Abdul Wahab Podungge<sup>b</sup>, Mulyani Mahmud<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 173 Kota Gorontalo

<sup>b</sup> Universitas Gorontalo, JL. Jenderal Sudirman No. 247 Kabupaten Gorontalo

<sup>c</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

email: [willsmood@ubmg.ac.id](mailto:willsmood@ubmg.ac.id)<sup>a</sup>, [podunggewahab@gmail.com](mailto:podunggewahab@gmail.com)<sup>b</sup>, [mulyani@ung.ac.id](mailto:mulyani@ung.ac.id)<sup>c</sup>

## INFO ARTIKEL

### **Riwayat Artikel:**

Received 06-08-2021

Revised 14-08-2021

Accepted 16-08-2021

### **Kata Kunci:** *Pinjaman Daerah, Pemulihan Ekonomi Nasional*

### **Keywords:** *Regional Loans, National Economic Recovery*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah pada Kabupaten Bone Bolango, dengan menganalisis 4 (empat) indikator persyaratan pemenuhan kelayakan pemberian Pinjaman PEN Daerah, yakni (1) Daerah tersebut terdampak Covid 19; (2) memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional; (3) Jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (4) memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. Indikator pertama dan kedua diuji dengan menggunakan analisis *desk study*. selanjutnya indikator yang ketiga dan keempat diuji dengan melakukan analisis laporan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dan menghitung *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* untuk menilai kemampuan daerah mengembalikan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango layak mendapatkan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Bone Bolango memenuhi 4 (empat) persyaratan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional tersebut.

## ABSTRACT

*This study aims to assess the feasibility of regional national economic recovery loans (PEN) in Bone Bolango Regency, by analyzing 4 (four) indicators of eligibility requirements for granting Regional PEN Loans, namely (1) the area is affected by Covid 19; (2) have a Regional Economic Recovery program or activity that supports the National Economic Recovery program; (3) The remaining amount of the loan plus the amount of the loan to be withdrawn does not exceed 75 percent of the general revenue of the previous year's Regional Government Budget; (4) meet the ratio of regional financial capacity to repay regional loans of at least 2.5 percent. The first and second indicators were tested using desk study analysis. then the third and fourth indicators are tested by analyzing the financial statements of the Bone Bolango Regency in*

*2020 and calculating the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) to assess the ability of the region to repay loans. The results showed that Bone Bolango Regency deserved a regional loan from the Central Government. This is because Bone Bolango fulfills 4 (four) loan requirements for the national economic recovery area.*

---

@2021 William Indra S. Mooduto, Abdul Wahab Podunge, Mulyani Mahmud  
UNDER THE LICENSE CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional. Hal ini terlihat pada *trend* pertumbuhan ekonomi Nasional yang terkontraksi sangat dalam pada kuartal II-2020 sebesar 5,32 persen ( $y-0-y$ ) dan 4,19 persen ( $q-t-q$ ). begitupun dengan Bone Bolango, pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi. Hal ini tergambar pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto hanya sebesar 0,06 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tumbuh sebesar 6,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Bone Bolango atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, khususnya untuk Jasa Perusahaan, transportasi & pergudangan, serta jasa lainnya menunjukkan kontraksi yang cukup dalam masing-masing sebesar -6,41 persen, -4,72 persen, dan -4,73 persen. Disisi lain, sektor lapangan usaha yang masih bertahan adalah Jasa Keuangan & Asuransi, Pengadaan Listrik & Gas, serta jasa Informasi & Komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kondisi terjadinya kontraksi ekonomi akibat pandemi covid 19 ini, berdampak pada keberlangsungan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang terkendala dengan keterbatasan pendanaan APBD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berminat melakukan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Skema Pinjaman PEN Daerah ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah dan telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola program Pinjaman PEN Daerah tersebut.

Berkenaan dengan program Pinjaman PEN daerah ini, Pemerintah Bone Bolango berencana mengajukan usulan pinjaman sebesar 300 miliar. Rencana usulan pinjaman ini dialokasikan untuk pembangunan RSUD Toto Kabilia sebesar Rp 75 Miliar, Pembangunan RSUD Tombulilato Rp 30 Miliar, Pembangunan GOR Bulango Rp 60 Miliar, Pengembangan Pariwisata Rp 30 Miliar, Pembangunan Infrastruktur Jalan Rp 75 Miliar, dan Pembangunan Bone Bolango Bussines Center Rp 30 miliar (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, 2021). Namun rencana usulan ini perlu ditakar atau dinilai kelayakannya, apakah Pemerintah Bone Bolango Layak memperoleh pinjaman PEN

daerah ?.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjek PK), ada 4 (empat) persyaratan yang menjadi dasar kelayakan menerima pinjaman daerah, yakni (1). Daerah tersebut terdampak Covid 19; (2). Daerah tersebut memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional; (3). Jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (4). Daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. Oleh karena itu, tujuan riset ini adalah menakar kelayakan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari 4 (empat) aspek persyaratan Pinjaman PEN Daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

Konsep dasar pinjaman PEN daerah lahir sebagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak covid 19, yaitu dengan cara memberikan dukungan pembiayaan berupa pinjaman ke Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mendefinisikan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Republik Indonesia, 2018)

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat yakni berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri (Republik Indonesia, 2018)

Jenis Pinjaman Daerah terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek ini digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Selanjutnya Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan dan pemanfaatannya untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan (Republik Indonesia, 2018)

Pinjaman Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pinjaman Daerah Jangka Panjang. Jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun yang pemanfaatannya digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dengan tujuan:

- a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana;
- b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- c. Memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Republik Indonesia, 2003). Dalam arti yang luas, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai dengan uang (Ulum & Sofyani, 2016). Salah satu hak Negara adalah hak mengadakan pinjaman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ulum & Sofyani, 2016) menyatakan bahwa hak mengadakan pinjaman adalah hak untuk menutupi kekurangan dari penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, jika keseluruhan penerimaan tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan pendanaan program dan kegiatan pemerintah.

Menurut (Irawan & Suparmoko, 2012) pinjaman atau utang negara terdiri dari dua macam, yakni *reproductive debt* dan *dead weight debt*. *reproductive debt* merupakan utang yang dijamin dengan kekayaan negara, sedangkan *dead weight debt* merupakan utang yang tanpa disertai jaminan kekayaan. Olehkarena itu, dalam hal ini pinjaman PEN daerah dapat dikategorikan sebagai jenis pinjaman *reproductive debt* yang pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjamannya diambil dari pendapatan asli daerah.

Pinjaman daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Oktaviani, 2018). Selanjutnya, pinjaman daerah yang penggunaannya untuk investasi publik akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat (Dwiastuti, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis 4 (empat) indikator persyaratan dalam memenuhi kelayakan pemberian Pinjaman PEN Daerah, yakni (1) Daerah tersebut terdampak Covid 19; (2) Daerah tersebut memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional; (3) Jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (4) Daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman

daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.

Indikator pertama dan kedua diuji dengan menggunakan analisis *desk study* pada data sekunder terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bone Bolango dan Data Rencana Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiapkan oleh BAPPEDA Bone Bolango. Selanjutnya, indikator yang ketiga dan keempat diuji dengan melakukan analisis laporan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kemudian khusus untuk menghitung dan menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi semua kewajiban daerah atas Pinjaman Daerah dengan menghitung *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, menjelaskan bahwa *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo (Republik Indonesia, 2000).

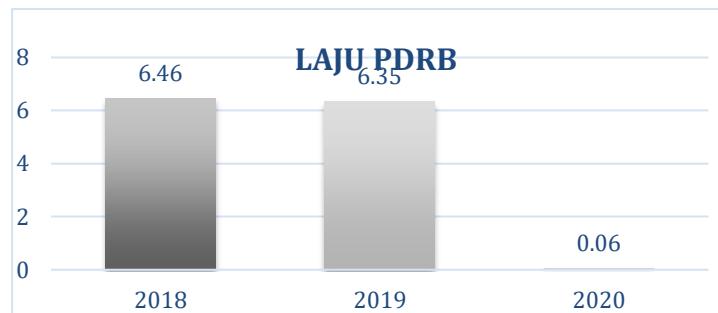
## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Terdampak Pandemik Covid-19

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan bahwa Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah pertama di Provinsi Gorontalo yang terpapar oleh pandemi covid 19. Kasus pertama ini terkonfirmasi setelah diperoleh hasil pemeriksaan *swab* dari Laboratorium Balai Besar Kesehatan Makassar yang menyatakan bahwa pasien positif covid 19. Pasien yang positif covid 19 ini merupakan warga Kelurahan Tumbihe, Kecamatan kabela, Kabupaten Bone Bolango. Sampai dengan tanggal 03 Januari 2021, Kabupaten Bone Bolango masuk pada zona merah penyebaran covid 19 beresiko tinggi (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020).

Secara psikologis, dengan adanya kasus pertama covid 19 di Gorontalo berada di Bone Bolango, maka masyarakat Bone Bolango merasakan adanya kekhawatiran untuk terpapar covid 19. Sehingga secara langsung hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bone Bolango. Pertumbuhan ekonomi Bone Bolango mengalami penurunan. Hal ini didasari pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto hanya sebesar 0,06 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tumbuh sebesar 6,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1. Laju PDRB



Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 1)

### Adanya Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Selanjutnya, indikator persyaratan kedua dalam memenuhi kelayakan pemberian Pinjaman PEN Daerah, yakni daerah memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan hasil analisis *desk study* dan observasi diperoleh data bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Bone Bolango meluncurkan beberapa program Inovasi Stabilisasi Ekonomi Daerah ditengah penanganan covid 19 menuju adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), yaitu Rumahku-Kebunku, Gerakan Sayang Tetangga, Halo Patali, De Mantap (Delivery Dokumen Akta Kematian), Layanan PBB-P2 Online, dan Pembayaran Digital QRIS. Hal ini menunjukan kelayakan Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pinjaman PEN daerah karena adanya program tersebut.

### Jumlah Pinjaman tidak melebihi 75 Persen Penerimaan Umum APBD sebelumnya

Sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, Penerimaan Umum APBD didefinisikan sebagai seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dapat dilihat bahwa Bone Bolango tidak memiliki sisa pinjaman (Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, 2021). Sehingga, jika Kabupaten Bone Bolango mengajukan Pinjaman Rp 300 Miliar, maka jumlah ini tidak melebihi 75 persen dari Penerimaan Umum APBD 2020. Berikut data perhitungan perbandingan antara Penerimaan Umum APBD dengan Jumlah Pinjaman :

Tabel 1. Data perhitungan perbandingan antara Penerimaan Umum APBD dengan Jumlah Pinjaman

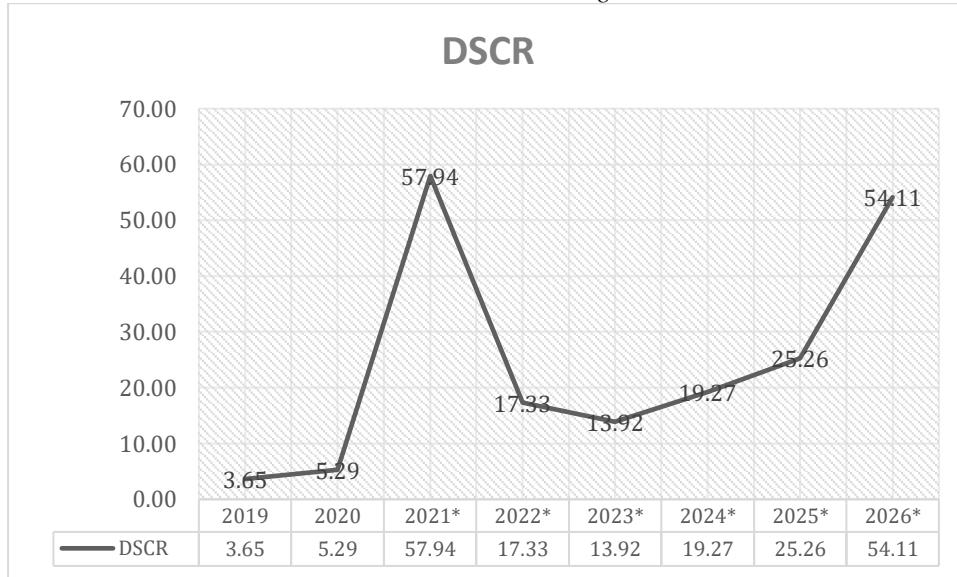
KETERANGAN	TAHUN 2020
Penerimaan Daerah	962,484,650,511.60
Dana Alokasi Khusus	(160,305,511,382.00)
Dana Darurat	0
Dana Pinjaman	0
Penerimaan Lain	(1,224,617,983.00)
<b>PENERIMAAN UMUM APBD</b>	<b>800,954,521,146.60</b>
<b>PU APBD X 75%</b>	<b>600,715,890,859.95</b>
<i>Dibandingkan dengan :</i>	
JUMLAH PINJAMAN :	
Sisa Pinjaman 2020	0
Rencana Pinjaman	300,000,000,000.00
<b>Ket* 75% dari PU APBD 2020 &gt; Jumlah Pinjaman</b>	

Sumber: Data Olah, 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 75 persen dari Penerimaan Umum APBD 2020 lebih besar dari jumlah pinjaman yang direncanakan untuk ditarik. Dengan kata lain bahwa jumlah pinjaman yang direncanakan untuk ditarik lebih kecil dari 75 persen Penerimaan Umum APBD 2020 dan hal ini menunjukan layaknya Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.

#### ***Debt Service Coverage Ratio* diatas 2.5 Persen**

Indikator terakhir untuk menilai kelayakan penerima pinjaman PEN Daerah adalah memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebesar 2.5 persen dengan cara menghitung *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). berdasarkan hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) untuk tahun 2020 menunjukan angka sebesar 5.29 persen yang melebihi 2.5 persen. hal ini berarti bahwa Bone Bolango memenuhi rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah. Selanjutnya jika diasumsikan bahwa nilai pinjaman yang direalisasikan adalah sebesar Rp175 Miliar dengan *tenor/grace* periode adalah 60 bulan/12 bulan maka dapat diproyeksikan perhitungan DSCR dari tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

Gambar 2. Data *Debt Service Coverage Ratio*

Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 2)

Berdasarkan grafik diatas dapat ditunjukkan bahwa proyeksi DSCR dari tahun 2021 sampai dengan 2026 lebih besar 2.5 persen. indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango layak mendapatkan pinjaman PEN Daerah.

### Proyeksi Dampak Pinjaman PEN Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pinjaman PEN daerah ini diproyeksikan akan berdampak pada peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Tahun 2019 sebesar 7.75 persen dan Tahun 2020 sebesar 7.9 persen. Dengan ekspektasi *return* 10 persen dari proyek investasi yang dibiayai dengan pinjaman daerah ini, dapat diprediksi bahwa target Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai diatas Rp 80 miliar.

Gambar 3. target Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 2)

Pinjaman PEN Daerah merupakan program pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid 19. Pada Tahun 2020 Pinjaman PEN Daerah telah terealisasi sebesar Rp19,13 triliun untuk 28 Pemerintah Daerah. Dua diantaranya adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku, masing-masing dengan dana pinjaman sebesar Rp 3,26 Triliun dan 700 Miliar. Berdasarkan Data BPS Provinsi Jakarta, pada Triwulan I-2021, perekonomian Jakarta terkontraksi 1,65 persen (*y-on-y*), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,14 persen (*y-on-y*) (Badan Pusat Statistik, 2021). sedangkan berdasarkan Laporan Perkonomian Provinsi Maluku oleh BI perwakilan Maluku, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 1,88 persen (*yoY*), masih lebih baik dibandingkan triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 3,42 persen (*yoY*) (Bank Indonesia, 2021).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan Maluku pada triwulan I 2021 ini, salah satu faktornya dipengaruhi oleh adanya Pinjaman PEN Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat diprediksi bahwa Pinjaman PEN Daerah yang akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Bone Bolango.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan Pinjaman PEN Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Bone Bolango layak mendapatkan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Bone Bolango memenuhi 4 (empat) persyaratan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional, yakni :

1. Bone Bolango merupakan daerah yang terkena dampak covid 19;
2. Bone Bolango mempunyai program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Bone Bolango memiliki Jumlah sisa pinjaman yang ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
4. Bone Bolango memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah diatas sebesar 2,5 persen.

Keterbatasan dari penelitian ini tidak menggunakan analisis rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar atau melunasi kewajiban jangka panjang dengan modal hingga total aset. Sehingga analisis ini dapat melengkapi analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) untuk menilai kemampuan daerah mengembalikan pinjaman. Selanjutnya penelitian ini tidak menggunakan analisis biaya manfaat (*cost benefit analyze*) dalam menilai kelayakan investasi publik yang akan dialokasi dari dana Pinjaman PEN Daerah. Oleh karena itu, disarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan menggunakan analisis rasio solvabilitas dalam mengukur kemampuan daerah mengembalikan pinjaman jangka panjangnya dan juga menggunakan analisis biaya manfaat (*cost benefit analyze*) dalam menilai kelayakan investasi publik.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi dan berdampak pada keberlangsungan agenda pembangunan di daerah Kabupaten Bone Bolango yang terkendala dengan keterbatasan pendanaan APBD yang *direcousing* untuk penanganan covid 19. Oleh karena itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango melalui hasil penelitian ini memberikan sejumlah saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Pemerintah Bone Bolango perlu mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) dalam menentukan porsi alokasi Pinjaman PEN Daerah untuk pembangunan RSUD Toto Kabilia, Pembangunan RSUD Tombulilato, Pembangunan GOR Bulango, Pengembangan Pariwisata, Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan Pembangunan Bone Bolango *Bussines Center*.
2. Dari dana pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Bone Bolango perlu memprioritaskan investasi publik. Karena investasi publik ini memiliki peran sentral dalam menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. misalnya Pengembangan Pariwisata. Pengembangan Pariwisata ini akan menciptakan pekerjaan baru secara langsung dalam jangka pendek dan secara tidak langsung dalam periode yang lebih lama. Disamping itu, perlu adanya pembangunan Infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan pariwisata.
3. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan 75 persen penerimaan umum APBD 2020 dengan Jumlah Rencana Penarikan Pinjaman Pemerintah Bone Bolango, maka pinjaman yang dapat diajukan sebesar Rp 300 miliar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango. (2021). *Rencana Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Triwulan 1 Tahun 2021*.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Mei 2021*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (2020). *Laporan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo*.
- Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 73–91. <http://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Helly-Suharlina.pdf>
- Irawan, & Suparmoko, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. BPFE.
- Oktaviani, A. N. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 305–313. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25264>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 2020 Anaudited*.
- Republik Indonesia. (2000). *Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Aditya Media Publishing.

**Lampiran 1**

	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2018	2019	2020
Lapangan Usaha			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,99	5,26	-0,79
Pertambangan dan Penggalian	1,22	5,55	-1,28
Industri Pengolahan	6,56	11,06	-1,15
Pengadaan Listrik dan Gas	7,02	8,58	17,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,72	14,61	-3,53
Konstruksi	6,32	1,39	-0,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,19	13,08	-1,14
Transportasi dan Pergudangan	5,29	5,43	-4,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,70	6,33	-1,03
Informasi dan Komunikasi	9,66	7,29	7,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	-2,41	11,39
Real Estat	5,55	9,32	1,04
Jasa Perusahaan	5,53	5,95	-6,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,84	2,64	0,01
Jasa Pendidikan	8,77	9,20	5,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,12	9,85	1,89
Jasa lainnya	3,36	4,45	-4,73
Produk Domestik Regional Bruto	6,46	6,35	0,06
sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango			
Source Url: <a href="https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/52/62/1/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-bone-bolango-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html">https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/52/62/1/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-bone-bolango-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html</a>			
Access Time: April 28, 2021, 10:36 am			

## Lampiran 2

SIMULASI PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)									
RENCANA PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO									
DSCR >= 2,5%									
DSCR = $\{(PAD+BD+DAU) - (BELANJA WAJIB)\} / (POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN2)$									
		2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
PAD =		75,724,604, 086.44	76,066,63 0,321.60	83,673,293, 353.76	91,279, 956,38 5.92	98,886,61 9,418.08	106,49 3,282,4 50.24	114,09 9,945,4 82.40	121,70 6,608,5 14.56
BD =		59,166,867, 363.00	124,708,0 01,408.00	190,249,13 5,453.00	255,79 0,269,4 98.00	321,331,4 03,543.00	386,87 2,537,5 88.00	452,41 3,671,6 33.00	517,95 4,805,6 78.00
DAU =		500,040,03 7,000.00	458,408,1 22,000.00	629,477,11 6,800.00	800,54 6,111,6 00.00	971,615,1 06,400.00	1,142,6 84,101, 200.00	1,313,7 53,096, 000.00	1,484,8 22,090, 800.00
BW =		(611,236,09 0,381.00)	(626,348, 348,269.2 0)	(641,460,60 6,157.40)	(656,57 2,864,0 45.60)	(671,685, 121,933.8 0)	(686,79 7,379,8 22.00)	(701,90 9,637,7 10.20)	(717,02 1,895,5 98.40)
		23,695,418, 068.44	32,834,40 5,460.40	261,938,93 9,449.36	491,04 3,473,4 38.32	720,148,0 07,427.28	949,25 2,541,4 16.24	1,178,3 57,075, 405.20	1,407,4 61,609, 394.16
dibagi :									
P =		6,480,738,0 90.0	6,212,135, 070.00	0	18,229, 166,66 7.00	43,750,00 0,000.00	43,750, 000,00 0.00	43,750, 000,00 0.00	25,520, 833,33 3.00
B =		18,312,078. 06		2,447,360,4 17.00	9,779,4 67,882. 00	7,736,561, 632.00	5,346,8 65,741. 00	2,819,0 27,199. 00	485,44 9,797.0 0
BL =				2,073,750,0 00.00	323,75 0,000.0 0	249,557,2 92.00	168,61 9,792.0 0	87,682, 292.00	6,744,7 92.00
		6,499,050,1 68.06	6,212,135, 070.00	4,521,110,4 17.00	28,332, 384,54 9.00	51,736,11 8,924.00	49,265, 485,53 3.00	46,656, 709,49 1.00	26,013, 027,92 2.00
DSCR =		3.65	5.29	57.94	17.33	13.92	19.27	25.26	54.11